

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Adrian Sutedi. (2022). *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika.
- Arifin, M. Z. (2024). *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik)*. PT Publica Indonesia Utama.
- Atmasasmita, R. (2019). *Reformasi Hukum dan Kejaksaan*. Prenada Media.
- Bungin, B. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Kencana.
- Hamzah, A. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hasibuan, A. (2019). *Sejarah Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Genta Hukum.
- Ibrahim, J. (2016). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Bayumedia Publishing.
- Karyanti, T., Prihati, Y., & Galih, S. T. (2019). *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia*. Deepublish.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Buku Saku Kejaksaan Republik Indonesia: Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*. Kejaksaan RI.
- Kristiana, Y. (2018). *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*. Citra Aditya Bakti.
- Marbun, R. (2022). *Hukum dan Kekuasaan Penegakan Hukum di Indonesia*. Deepublish.
- Mertokusumo, S. (2018). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty.
- Miftakhuddin, M. (2019). *Historiografi Korupsi Di Indonesia: Resensi Buku Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia*. Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan, 7(2), 168–172.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhamad, W. M. N., Wibowo, W., Pranowo, M. D., & P. A. (2023). *Problematika Asset recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Penerbit Adab.
- Mulyana, A. N., & Teuku Rahman. (2025). *Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif*. Penerbit Kbm Indonesia.
- Naz, D. N. (2017). *Hukum Pidana Dan Kewenangan Jaksa*. Kencana.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.

- Nugroho, R. (2018). *Reformasi Institusi Penegak Hukum*. Nuansa Cendekia.
- Nurjaya, I. N. (2014). *Paradigma Socio-Legal dalam Penelitian Hukum: Sebuah Perspektif Epistemologi*. Setara Press.
- Panggabean, D. H. (2020). *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori, Praktik, dan Yurisprudensi di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer.
- Qamar, N., Amas, K. S. Y. D., Palabbi, R. D., Suherman, A., & Rezah, F. S. (2018). *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat Or Machtstaat)*. Cv Social Politic Genius (Sign).
- Salim, H. S. (2018). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Sanjaya, W. (2016). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Kencana.
- Subekti, D. (2020). *Hukum Acara dan Lembaga Penegak Hukum*. Setara Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarna, Y., & Kadriah, N. (2023). *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Analisis Kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Sumaryanto, A. D. (2020). *Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakad Media Publishing.
- Suryosumpeno, C. (2020). *Rezim Pemulihan Aset: Antara Dibenci dan Dibutuhkan! (Vol. 5)*. Reqqbook.
- Sutrisno, E. (2023). *Kejaksaan dan Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Tan, J. P. (2021). *Kamus Istilah Hukum Kontemporer*. Prenada Media Group.
- Yuliana, D. (2021). *Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Laksbang Pressindo.
- Yusni, M. (2020). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Artikel dalam Jurnal

- Adisaputra, A. (2025). Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Global Research and Innovation Journal*, 1(3), 245–251.
- Agustine, V. O. (2019). RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1.
- Ahmad, A., Thalib, H., & Badaru, B. (2021). Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran

- Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 1–15.
- Alyausyar, M. D. H., & Ridwan. (2025). Kajian Penjatuhan Pidana Penjara sebagai Subsidair pada Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 1–14.
- Arianto, A. F. (2024). Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasan Aset. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1601–1615.
- Badan Keahlian DPR RI. (2026). Isu Sepekan (5–11 Januari 2026): Mulai Berlaku KUHP dan KUHAP Baru. *II PUSLIT DPR RI, Jakarta*.
- Cintya, S., Shrishti, S., & Kansil, C. S. T. (2025). Reformulasi *Asset recovery* Sebagai Pidana Pokok dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1(3), 373–382.
- Dimyati, A. R. (2021). Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau dari Teori Keadilan dan Teori Kemanfaatan. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 11(1), 40–55.
- Emirsya, M., Subaidi, J., & Saputra, F. (2025). Penerapan asas *dominus litis* oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3), 3.
- Gamaliel, S. K. R. & H. (2019). Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(4), 4504–4513.
- Hartono, M. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 281–302.
- Hersriavita, S., Karjoko, L., & Novianto, W. (2019). Upaya Pengembalian Kerugian Negara dari Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7(1), 15–28.
- Hamzah, A. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Husna, R. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Uang Pengganti Untuk

- Pengembalian Kerugian Negara Dalam Putusan Perkara Nomor:01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VII(1), Januari–Juni, 1–15.
- KSP, K. A. B., Yulianti, N. P. R., Gede, D., & Mangku, S. (2018). Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Buleleng.
- Kurniawan, F., Alghazali, M. S. D., & Fadhila, A. (2022). Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 565–588. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.279>
- Mahmud, A. (2018). Problematika *Asset recovery* dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 347–366.
- Murti, I. M. G. W., Hartono, M. S., & Yudiawan, I. D. G. H. (2025). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Buleleng. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 7309–7322.
- Nasution, A. (2018). Metode Penelitian Kualitatif: Studi di Bidang Ilmu Sosial Dan Hukum. *Raja Grafindo Persada*.
- Prakarsa, A., & Yulia, R. (2017). Model Pengembalian Aset (*Asset recovery*) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Prioris*, 6(1), 31–45. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1834>
- Purba, I. G., & Suwito. (2017). Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Terhadap Harta Kekayaan Tersangka Dalam Perkara Korupsi Yang Ditinjau Dari Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Normatif*, 1, 18–26.
- Putri, D. (2021). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, V, 49–54.
- Rori, J. G. (2018). Penjatuhan Hukuman Pidana Tambahan Pencabutan Hak-Hak Tertentu oleh Hakim dalam Kasus Korupsi. *Lex Crimen*, Vol. VII(9), 62–69. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

- Rosalina, F. (2022). Mengembalikan Ide Dasar Keseimbangan Tujuan Pidanaan: Koreksi atas Wacana Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1605–1606.
- Santosa, I. K. D., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Pengaturan Asas *Oportunitas* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 70-80.
- Siregar, H., Kirani, N., & Tarigan, D. (2023). Upaya Pencegahan *White Collar Crime*. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(1), 101–110. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2284>
- Suandita, I. G. E., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2023). Pengaturan Hukum Terkait Hak Dan Kewajiban Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 6(1), 34-45.
- Sudarmayana, I. M. L., Yulianti, N. P. R., & Dantes, K. F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya Indonesia Guna Menanggulangi Klaim Dari Negara Asing Ditinjau dari Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 719-730.
- Trisnajaya, R. M. (2024). Konsep Eksekusi Tindak Pidana Korupsi dengan Mengedepankan Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (*Asset recovery*). *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 3(3), 162–180. Universitas Dharma Andalas.
- Wibowo, O., Wahyuningsih, T., & Pratin. (2023). *Analysis of Accounting Policies on the Utilization of Fixed Assets of Public Service Agency* (Blu): Case Study At Politeknik Keuangan Negara-Stan. *Jurnal Kelitbangan*, 3(3), 265–278.
- Widhiyaastuti, J. &. (2015). Peran Kejaksaan Dalam Upaya *Asset recovery* Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Bali). *Jurnal Universitas Udayana Bali*, 1–13.
- Yasmia, N. L. W., Ardhy, S. N., Setianto, M. J., Astawa, I. G. P. B., Yudiawan, I. D. G. H., & Ariestu, I. P. D. (2025, October). Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Prepentif Penegakan Korupsi Di Sma Bali Mandara. *In Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 10, No. 1).

- Yudiawan, I. D. G. H., Setianto, M. J., & Yasmiati, N. L. W. (2024, December). Optimalisasi Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Tembuku. *In Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 9, No. 1, pp. 1150-1157).
- Yuliartini, N. P. R. (2015). Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Yusril, M., Syachidin, & Kamal. (2016). Implementasi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggala). 1(2), 1–23.

Artikel dalam Internet

- Katadata. (2023, September 13). *Pengertian korupsi menurut para ahli beserta penyebabnya*. Katadata.co.id.
<https://katadata.co.id/lifestyle/varia/650145d502736/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-beserta-penyebabnya> Diakses pada 17 Mei 2025.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024, Desember 19). Kinerja 2020–2024: KPK kembalikan kerugian negara senilai Rp2,5 triliun.
<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-2020-2024-kpk-kembalikan-kerugian-negara-senilai-rp25-triliun> Diakses pada 18 Mei 2025.
- Pemerintah Provinsi Bali. *Profil Kabupaten Badung*. Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali — TaruBali. Diakses dari
<https://tarubali.baliprov.go.id/badung/> pada tanggal 20 September 2025.
- Pemkab Badung. (2025, April 30). *Rakor Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025 oleh KPK RI*. Pemerintah Kabupaten Badung.
<https://badungkab.go.id/kab/berita/62975-rakor-program-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-tahun-2025-oleh-kpk-ri> Diakses pada 17 Mei 2025.
- PN Semarang. (2022, September 23). *Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Recovery Kerugian Keuangan Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Pengadilan Negeri Semarang. <https://pn-semarangkota.go.id/web/pidana-pembayaran-uang-pengganti-sebagai-recovery-kerugian-keuangan-negara-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/> Diakses pada 25 Agustus 2025.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025, Februari 21). *Kerugian Negara: Telaah Dari Sudut Pandang Hukum Keuangan Negara*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/diy/id/data-publikasi/309-artikel/3960-kerugian-negara-telaah-dari-sudut-pandang-hukum-keuangan-negara.html> Diakses pada 25 Agustus 2025.

Skripsi

Darmika, P. (2025). *Optimalisasi Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemulihan Kerugian Negara Melalui Asset Tracking Atas Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Buleleng*. Universitas Pendidikan Ganesha.

Shafinaz, F. A. (2025). *Peran Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Dalam Proses Perampasan Aset dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1042).

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010–2014, tanggal 28 Januari 2010.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Hakim dalam Penerapan Asas Peradilan yang Adil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006.

